

# **SKRIPSI**



## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGHASUT UNTUK MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP APARAT KEPOLISIAN**

(Studi Kasus Putusan No. 258/Pid.B/2011/PN.Mks)

**OLEH**

**SISKA AMRYANI AZIS**

**B 111 10 331**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2014**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MENGHASUT UNTUK MELAKUKAN KEKERASAN  
TERHADAP APARAT KEPOLISIAN**

(Studi Kasus Putusan No. 258/Pid.B/2011/PN.Mks)

**OLEH:**

**SISKA AMRYANI AZIS**

**B 111 10 331**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Dalam Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2014**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGHASUT UNTUK MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP APARAT KEPOLISIAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 258/ Pid.B/ 2011/ PN.Mks)

**Disusun dan diajukan oleh**

**SISKA AMRYANI AZIS**

**B 111 10 331**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis, 20 Februari 2014  
Dan Dinyatakan Diterima

#### **Panitia Ujian**

**Ketua**

  
**Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.**  
NIP. 19620105 198601 1 001

**Sekretaris**

  
**Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.**  
NIP. 19660827 199203 2 002

**An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,**

  
**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 003

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :**

**Nama : Siska Amryani azis**

**Nomor Induk : B 111 10 331**

**Bagian : Hukum Pidana**

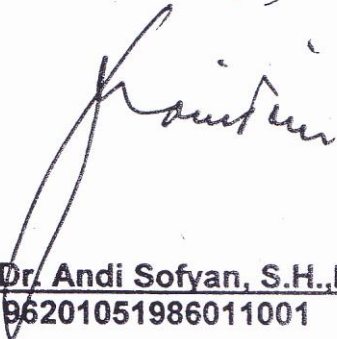
**Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Menghasut Untuk Melakukan Kekerasan Terhadap  
Aparat Kepolisian.**

**(Studi Kasus Putusan No.258/Pid.B/2011/PN.Mks)**

**Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di  
Fakultas Hukum Universits Hasanuddin.**

**Makassar, Januari 2014**

**Pembimbing I,**



**Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H.**  
**NIP. 196201051986011001**

**Pembimbing II,**



**Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H.**  
**Nip.195903171987031002**

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **SISKA AMRYANI AZIS**  
No. Pokok : B111 10 331  
B a g i a n : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Menghasut Untuk  
Melakukan Kekerasan terhadap Aparat Kepolisian  
(Studi Kasus Putusan No.258/Pid.B/2011/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2014



Dekan Fakultas Hukum, Bidang Akademik,

Prof. Dr. H. Abrar Saleng, S.H., M.H.  
NIP. 19630419 198903 1 003

## ABSTRAK

**Siska Amryani Azis B 111 10 331**, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Menghasut untuk Melakukan Kekerasan terhadap Aparat Kepolisian* (Studi Kasus Putusan No.258/Pid.B/2011/PN.Mks). Dibimbing oleh Bapak **Andi Sofyan** selaku pembimbing 1 dan Ibu **Dara Indrawati** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana menghasut untuk melakukan kekerasan terhadap aparat kepolisian dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan nomor 258/Pid.B/2011/PN.Mks.

Untuk mencapai tujuan tersebut penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendetakan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilengkapi dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penulis berusaha menelaah bahan hukum yang diperoleh dari beberapa buku dan literature, termasuk Putusan Hakim, Surat Dakwaan maupun Tuntutan Jakas serta bahan non-hukum yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan dalam bentuk Tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

Temuan yang diperoleh adalah: 1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana menghasut untuk melakukan kekerasan terhadap aparat kepolisian yaitu Pasal 160 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 170 KUHP sudah sesuai mengingat surat dakwaan yang disusun secara kumulatif oleh Jaksa penuntut umum dan perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut. 2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada putusan No. 258/Pid.B/2011/PN.Mks telah sesuai dengan berdasarkan pada analisis yuridis, fakta-fakta persidangan, alat bukti baik berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, petunjuk serta diperkuat dengan keyakinan hakim sendiri. Namun, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih cukup ringan serta masih jauh dari ancaman maksimal pidananya yaitu 6 (enam) tahun penjara, dimana dalam hal ini penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelakunya sendiri dan tidak akan menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Menghasut untuk Melakukan Kekerasan terhadap Aparat Kepolisian (Studi Kasus Putusan No.258/Pid.B/2011/PN.Mks)”** untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Merangkaikan kata menjadi kalimat, kemudian membahas dan menyatukannya menjadi sebuah karya ilmiah merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk secepatnya diselesaikan karena diperlukan suatu proses yang relatif panjang, menyita segenap tenaga dan pikiran dengan penuh kesabaran, kerja keras, serta motivasi, dukungan dan doa orang-orang tercinta serta bantuan dari banyak pihak mustahil Penulis sanggup menjalani tahap demi tahap dalam proses penulisan skripsi maupun selama menjalani kehidupan akademik di kampus merah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat

diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dalam kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orangtua Penulis Ayahanda **H. Abd. Azis Mansyur** dan Ibunda **Hj. Mariani Muridan** atas segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang dan cinta yang mereka curahkan, mereka rela banting tulang memenuhi segala kebutuhan penulis baik berupa materi maupun nonmateri sejak lahir hingga penulis menempuh detik-detik terakhir dalam menyelesaikan studi hingga saat ini. Serta kakak-kakakku tersayang Isnaeny Azis S.E, Yus Ira S.KM, dan Suharti Ayu Wardani S.Kep dimana mereka selalu memberikan dukungan yang tidak ternilai harganya. Begitu banyak jasa mereka yang penulis tidak mampu untuk membalasnya selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S.DFM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Anshory Ilyas, S.H, M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin



serta Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa membimbing, memberikan saran dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H, Bapak H.M Imran Arief, S.H., M.H, dan Ibu Nur Azizah, S.H., M.H selaku Penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan selama penyusunan skripsi penulis.
6. Bapak Muchsin Salnia, S.H selaku penasehat akademik yang selalu memberikan motivasi dan keteguhan hati selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh bapak dan ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan seluruh staf atas segala bantuannya selama penulis melakukan penelitian.

9. Bapak dan Ibu Kepala Desa Pongo serta seluruh keluarga yang selama KKN banyak memberikan bantuan, arahan, dan kasih sayang kepada Penulis.
10. Untuk sistersku tersayang Andi Cendra Opu, A.Vebryanti Rasyid, Risnawati, Andi Febriani Arif, Revica Adhani, Ika Ramadhani yang menjadi sahabat seperjuangan selama di kampus merah.
11. Untuk Syahrul Ibsar atas segala perhatian, pengertian, motivasi serta bantuan dan dukungannya selama ini.
12. Untuk sahabat-sahabatku Citra, Vebong, Wana, Lina dan Adil atas persahabatan dan kebersamaan yang sudah terjalin hingga sekarang.
13. Untuk sepupuku Vicky dan Irwani atas keceriaan, motivasi serta semangat yang diberikan.
14. Untuk teman-teman Legitimasi 2010 atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
15. Teman-teman KKN Gel.85 Kec. Masamba khususnya kepada Posko Desa Pongo Ika, Fadly, K'Mitra, K'Mawan, Iman dan K'Abdan
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan motivasi, dukungan, sumbangan pemikiran, bantuan materi maupun nonmateri.

Akhirnya teriring doa, semoga segala bantuan dan apa yang telah bapak/ibu/saudara(i) serta rekan-rekan lakukan dapat bernilai amal jariyah

disisi Allah SWT. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada penulis sendiri. Amin

Makassar, 1 Januari 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
 <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
 <b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	6
B. Tindak Pidana.	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	6
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	8
C. Pengertian Tindak Pidana Penghasutan.....	16
D. Kejahatan Kekerasan	
1. Pengertian Kejahatan Kekerasan .....	21
2. Jenis-Jenis Kejahatan Kekerasan .....	25
E. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	
1. Pengertian Kepolisian .....	31
2. Tugas dan Wewenang Aparat Kepolisian .....	33
 <b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Jenis dan Sumber Bahan .....	39
D. Teknik Pengumpulan Bahan.....	40
E. Teknik Analisa Bahan .....	40
 <b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Menghasut untuk Melakukan Kekerasan terhadap Aparat Kepolisian .....	42
1. Posisi Kasus .....	43
2. Dakwaan .....	45
3. Tuntutan .....	48
4. Amar Putusan.....	48
5. Analisis Penulis.....	50
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana dalam Putusan No. 258/Pid.B/2011/PN.Mks.....	58

	1. Pertimbangan Hakim .....	58
	2. Analisis Penulis .....	61
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	65
	B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering menjadi pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan

demikian, model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Kekerasan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang dianggap normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*deffense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan (*violence*) menurut sebagian ahli hukum menyebutnya sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis. Sehingga jelaslah bahwa kekerasan adalah suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dalam pandangan klasik, suatu tindak kekerasan (*violence*) menunjuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang karena menyangkut pula perbuatan “mengancam” di samping suatu tindakan nyata.

Sebagaimana peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Desember 2010 sekitar pukul 16.30 WITA, yang bertempat di jalan Urip Sumiharjo dekat flyover atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dimana beberapa orang yang melakukan unjuk rasa di muka umum dengan lisan menghasut untuk melakukan kekerasan terhadap anggota polisi yang sedang bertugas untuk mengatur lalu lintas yang dilakukan dengan cara melemparkan batu secara berkali-kali kepada polisi tersebut.

Sehingga akibat dari lemparan batu tersebut para polisi berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara lari berpencar dan beberapa dari mereka berlari ke dalam *showroom* mobil PT. Hajji Kalla, yang kemudian terlihat oleh pengunjuk rasa dan berusaha mengejar polisi tersebut kemudian memukul salah seorang polisi dengan batu sehingga menyebabkan luka-luka sebagaimana *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara dan selain melakukan kekerasan terhadap aparat kepolisian, peserta unjuk rasa juga melakukan pelemparan dan pembakaran terhadap pos polisi lalu lintas dan pengrusakan empat mobil dinas polisi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengambil skripsi dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghasutan Untuk Melakukan Kekerasan Terhadap Aparat Kepolisian (Studi Kasus Putusan No.258/Pid.B/2011/PN.MKS)*".



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Menghasut untuk Melakukan Kekerasan terhadap Aparat Kepolisian dalam putusan nomor 258/Pid.B/2011/PN.Mks ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan nomor 258/Pid.B/2011/PN.Mks ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Menghasut untuk Melakukan Kekerasan terhadap Aparat Kepolisian dalam putusan nomor 258/Pid.B/2011/PN.Mks
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan nomor 258/Pid.B/2011/PN.Mks.

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain :

1. Secara Akademis/Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut tindak pidana menghasut untuk melakukan kekerasan terhadap aparat kepolisian di Kota Makassar.

## 2. Secara Praktis

Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam penegak hukum di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana menghasut untuk melakukan kekerasan terhadap aparat kepolisian di Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tinjauan Yuridis**

Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan hukum pidana materiil, khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai apa itu delik, siapa pelakunya, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap terdakwa pelaku tindak pidana.

#### **B. Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam ilmu Hukum Pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda "*strafbaar feit*" yang merupakan istilah resmi dalam "*Wetboek van Strafrecht*" yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang masih berlaku di Indonesia sampai sekarang.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro (Adami Chazawi, 2011:75), menerangkan bahwa tindak pidana itu adalah "suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana". J.E. Jonkers (Adami Chazawi, 2011:75) menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu "perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang

berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

R.Tresna (Mardani, 2008:59) menggunakan istilah peristiwa pidana, “yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman”. Sedangkan C.S.T Kansil (Mardani, 2008:60) menggunakan istilah delik, yaitu “perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Menurut Pompe (P.A.F. Lamintang, 1997:182) yang dimaksud tindak pidana adalah:

Sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Moeljatno (Adami Chazawi, 2011:71), menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pandangan yang memisahkan

antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering disebut *dualisme*, yang juga dianut oleh banyak ahli, misalnya Pompe, Vos, Tresna, Roeslan Saleh, dan A. Zaenal Abidin.

Selain pandangan dualisme, ada pandangan lain yakni pandangan *monoisme* yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Ada banyak ahli hukum yang berpandangan monoisme, dalam pendekatan terhadap tindak pidana, antara lain, JE Jonkers, Wirjono Prodjodikoro, H.J.van Schravendijk, Simons, dan lain-lain.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam menjabarkan suatu rumusan tindak pidana kedalam unsur-unsurnya maka yang mula-mula harus dibahas adalah suatu “tindakan manusia” karena dengan tindakan itulah seseorang dapat melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

### **1. Unsur Subjektif**

Menurut Leden Marpaung (2009:9), unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*).

Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa/schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni :

- 1) tak berhati-hati;
- 2) dapat menduga akibat perbuatan itu.

## 2. Unsur Objektif

Menurut Leden Marpaung (2009:9), unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia, berupa :
  - 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
  - 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiadakan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia.  
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)  
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :
  - 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
  - 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum  
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Masing-masing golongan yang mempunyai pendapat sendiri-sendiri.

a. Simons (Sudarto, 1997:178), unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan Hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Oleh yang bertanggungjawab.

Selanjutnya Simons (Sudarto, 1997:179), membedakan unsur-unsur *Strafbaar feit* antara unsur subyektif dan unsur obyektif.

1) Unsur subyektif yaitu :

- a) Orang yang mampu bertanggungjawab;
- b) Kesalahan (dolus atau culpa) artinya perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

2) Unsur Obyektif yaitu :

- a) Perbuatan orang;
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

b. Mezger (Sudarto, 1997:180), menyebutkan unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- 1) Perbuatan dalam arti luas oleh manusia;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana.

c. Van Hamel (Sudarto, 1997:180), unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam UU;
- 2) Bersifat melawan hukum;

3) Dilakukan dengan kesalahan.

d. Van Baumen (Sudarto, 1997:180), unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan oleh manusia;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Moeljatno (1984:89), golongan dualistis menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- a. Perbuatan oleh manusia;
- b. Memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil).

Selanjutnya Moeljatno menyatakan syarat formil itu harus ada karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, sama halnya syarat-syarat materiil harus ada karena perbuatan itu harus benar-benar dirasakan bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat. Dalam buku *Azas-Azas Hukum Pidana*, Moeljatno berpendapat bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, bukan berarti perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum karena perbuatan itu sudah demikian wajarnya, sifat melawan hukumnya sendiri tidak perlu dinyatakan sendiri.

Menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2009:10), unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif.



Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa :

- a. Suatu tindakan,
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Kesalahan (*schuld*).

Menurut Moeljatno (Leden Marpaung, 2009:10), tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Menurut Lamintang (Leden Marpaung, 2009:10), unsur tindak pidana terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yang dimaksud oleh Lamintang adalah sebagai berikut (Leden Mapaung, 2009:11):

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poeding* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Kemudian unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yang dimaksud Lamintang adalah sebagai berikut (Leden Marpaung, 2009:11);

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kualitas, yakni hubungan dari suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Mencermati pendapat para pakar di atas tentang unsur-unsur tindak pidana, maka pendapat Satochid Kartanegara yang memasukkan *loerekeningsvalbaarheid* sebagai unsur subjektif kurang tepat. Hal ini karena tidak semua bersumber dari diri pribadi si pelaku namun antara lain dapat bersumber dari *overmacht* atau *ambtelijk bevel* (pelaksanaan perintah jabatan).

Pendapat Lamintang yang menjelaskan bahwa unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pribadi si pelaku

adalah tepat, tetapi yang tersebut pada butir 2, 3 dan 4 unsur subjektif, pada hakikatnya termasuk jenis “kesengajaan” pula.

Vos (Adami Chazawi, 2005:72) merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan-peraturan perundang-undangan”.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah (Adami Chazawi, 2005:80):

1. Kelakuan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Dalam peraturan perundang-undangan.

J.E Jonkers (Adami Chazawi, 2005:75), yang merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Dari batasan yang dibuat oleh Jonkers (penganut paham monoisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah (Adami Chazawi, 2005:81) :

1. Perbuatan (yang);
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
4. Dipertanggungjawabkan.

Walaupun rincian yang dibuat Vos dan Jonkers di atas tampak berbeda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu

tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur yang mengenai dirinya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada 4 faktor untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana atau delik kejahatan yaitu :

- a. Adanya laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP), yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Biasanya laporan ini datang dari saksi-saksi yang berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau dari keluarga korban, adapun laporan juga datang dari korban dan tidak jarang pula pelaku itu sendiri yang melaporkan perbuatannya dalam hal ini disebut menyerahkan diri.
- b. Adanya pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP), yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
- c. Tertangkap tangan (Pasal 1 butir 29 KUHAP), yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila

sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa iya adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Adapun peristiwanya tidak boleh lebih dari 24 jam.

- d. Pengetahuan sendiri polisi. Polisi menduga adanya tindak pidana yang telah atau sedang atau diduga terjadi peristiwa pidana sehingga pihak kepolisian melakukan penggeledahan di TKP yang diduga tempat terjadinya suatu tindak pidana, atau cara lain sehingga penyidik ketahui terjadinya delik seperti baca di surat kabar, dengar dari radio, dengar orang bercerita dan sebagainya. Dapat juga pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan seseorang yang diduga terlibat tindak pidana.

### **C. Pengertian Tindak Pidana Menghasut**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 1989:300), tindakan menghasut adalah "suatu perwujudan untuk membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan, memberontak, dsb)."

Pengertian menghasut berasal dari kata "hasut; meng-hasut." Menghasut adalah membuat orang berminat, bernaafsu, atau turut mendendam supaya orang lain melakukan perbuatan seperti yang dihasut itu, esensi dari perbuatan menghasut adalah usaha seseorang untuk

menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang biasanya dikehendaki oleh penghasut.

Adapun makna menghasut (*oprunien*), adalah membangkit-bangkitkan hati orang supaya marah. Terdapat padanan Pasal 160 KUHP dengan yang berlaku di Negeri Belanda yaitu Pasal 131 W.v.S. dan di Jerman (Pasal 110 KUHP Jerman). Hanya saja di dua Negara tersebut yang terlarang adalah melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum dan tidak untuk menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan. Dengan alasan jika kemudian ternyata tidak terdapat sanksi pidana apabila tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, tentunya adalah tidak dapat dipidana untuk menghasut orang agar tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan.

Wirjono Prodjodikoro (2008:152) berpendapat bahwa:

Menghasut tidak berarti memaksa atau memberi perintah, tetapi berusaha terutama dengan kata-kata agar orang atau orang-orang lain bergerak dengan kemauan sendiri untuk melakukan sesuatu. Dalam kata-kata yang dipergunakan oleh si penghasut dapat secara langsung disebutkan perbuatan mana yang diharapkan akan dilakukan oleh mereka yang dihasut. Mungkin juga perbuatan itu tidak disebutkan tetapi dapat mudah dimengerti perbuatan apa yang diharapkan itu.

Menurut Marhaban Zainun (Djoko Prakoso, 1988:103), menyatakan bahwa :

Pasal penghasutan tersebut di atas berbentuk delik formil karena inti *strafbaarfeit*nya ialah perbuatan/kelakuan menghasut di depan umum. Pasal 160 KUHP ini merupakan kelanjutan dari pasal 154 KUHP, karena pasal 160 KUHP ini menitikberatkan pada perbuatan “menggerakkan orang lain supaya menentang pemerintah yang ada.”

Adapun menurut R. Soesilo (1995:136), pengertian menghasut secara umum adalah :

Mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja.” Menghasut itu lebih keras dari pada “memikat” atau “membujuk” yang tersebut dalam pasal 55, tetapi bukan memaksa. Orang “memaksa” orang lain untuk berbuat sesuatu itu bukan berarti “menghasut.”

Selanjutnya R. Soesilo menjelaskan maksud hasutan itu harus ditujukan supaya :

- a. dilakukan sesuatu peristiwa pidana (pelanggaran atau kejahatan);
- b. melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan;
- c. jangan mau menurut peraturan undang-undang;
- d. jangan mau menurut perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang.

Sedangkan menurut Krisna Harahap (1996:50), Menghasut dapat dilakukan dengan cara lisan ataupun tulisan. Jika dilakukan dalam bentuk lisan, maka jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan, maka kejahatan itu menjadi selesai, sehingga unsur percobaan dalam hal ini tidak mungkin terjadi. Jika hasutan dilakukan dengan tertulis, maka karangan yang bersifat menghasut harus ditulis lebih dahulu dan kemudian disiarkan atau dipertontonkan baru tindak pidana itu dapat dikatakan selesai. Jika orang yang melakukan itu hanya baru menulis karangan, maka belum ada unsur percobaan dalam delik ini. Jika tulisan tersebut telah selesai dan ia bertindak untuk menyiarkan atau mempertontonkan tulisan tersebut tetapi belum sampai berhasil dan digagalkan, maka orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan percobaan yang dapat dihukum.

Rumusan tindak pidana Pasal 160 menurut R. Sugandhi (1980: 170) yang berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum dengan penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.00.

Dimana yang diancam hukuman dalam Pasal ini ialah perbuatan yang dilakukan secara lisan atau tulisan menghasut di muka umum (R. Sugandhi 1980:171) yaitu :

1. Supaya orang melakukan suatu tindak pidana atau melawan kuasa umum dengan kekerasan.
2. Supaya jangan menurut peraturan undang-undang atau perintah jabatan, yang diberikan menurut peraturan undang-undang.
3. Tindak pidana (pelanggaran atau kejahatan) ialah pelanggaran yang diancam dengan hukuman.
4. Melakukan kekerasan
5. Peraturan undang-undang, ialah semua peraturan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
6. Perintah jabatan, ialah perintah perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang. Apabila perintah itu diberikan kepada orang yang tidak berhak, maka berarti perintah itu tidak sah.

Orang baru dapat dihukum apabila hasutan itu dilakukan ditempat umum yang dikunjungi oleh orang banyak dan dapat mendengar atau menyaksikan kata-kata hasutannya, pelakunya tetap dapat dituntut walaupun orang yang mendengar atau menyaksikan hanya satu orang. Diartikan tempat umum misalnya: pasar, gedung pertunjukan dan sebagainya.



Untuk dapat dituntut menurut Pasal ini, tidak perlu dibuktikan apakah hasutan itu benar-benar terjadi. Tidak peduli apakah terdakwa mengetahui (mengerti) bahwa apa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana. Cukup apabila sudah terbukti bahwa apa yang dihasutkan tersebut adalah suatu peristiwa pidana.

Dalam perbuatan penghasutan ada dua kelompok orang yakni orang yang melakukan hasutan dan orang yang dihasut atau yang dijadikan target perbuatan menghasut yang diharapkan supaya dia tergerak untuk berbuat atau melakukan perbuatan tertentu sebagaimana yang dikehendaki penghasut. Oleh sebab itu, sumber niat untuk melakukan perbuatan tertentu yang dilarang dalam hukum pidana atau tindak pidana bersumber dari orang yang melakukan penghasutan atau penghasut.

Perbuatan menghasut umumnya bersifat aktif sedangkan orang yang dihasut bersifat pasif. Orang yang dihasut pada awalnya tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan pidana karena ada hasutan dari penghasut kemudian berubah dan tergerak untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dihasutkan oleh penghasut atau melakukan perbuatan pidana lain akibat pengaruh hasutan tersebut.

Termasuk menghasut apabila orang lain tersebut atau yang terhasut telah memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang dihasutkan oleh penghasut. Adanya hasutan dari penghasut sebagai pemicu orang tersebut kemudian melaksanakan niatnya untuk melakukan perbuatan pidana.

Tindak pidana menghasut di muka umum ini oleh Pasal 160 dirumuskan secara formal, yaitu hanya disebutkan perbuatan yang harus dilakukan oleh si pelaku dengan tidak diharuskan bahwa yang terjadi akibat yang dihendaki oleh si pelaku. Dengan demikian, terdapat perbedaan dengan hal "membujuk" untuk melakukan tindak pidana (*uitlokking*). Apabila suatu tindak pidana yang diharapkan oleh si penghasut benar-benar dilakukan, maka ada gabungan tindak pidana dalam satu perbuatan (*eendaadsche samenloop*) dari pasal 63 KUHP.

#### **D. Kejahatan Kekerasan**

##### **1. Pengertian Kejahatan Kekerasan**

Kejahatan kekerasan adalah suatu problema yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang serta membawa akibat tersendiri sepanjang masa. Sebelum membahas lebih jauh tentang masalah kejahatan kekerasan, penulis menganggap perlu untuk mengemukakan pengertiannya terlebih dahulu.

##### **a. Pengertian Kejahatan**

Pengertian Kejahatan bila ditinjau dari segi bahasa, maka kejahatan berasal dari kata dasar "jahat" yang mendapat awalan "ke" dan akhiran "an" di dalam kamus umum Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta (1990:394), kejahatan berarti sifat yang jahat; perbuatan yang jahat (seperti mencuri, membunuh, memperkosa dan sebagainya).

Mengenai pengertian kejahatan R.Soesilo (1985:11)

memberikan definisi kejahatan dari dua sudut pandang yaitu :

- a. Pengertian secara yuridis, kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP.
- b. Pengertian secara sosiologis, kejahatan meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, toh pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

Definisi kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum, menganggap bahwa kejahatan berarti perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan sebagai akibatnya akan dikenai sanksi. Ini dapat diartikan bahwa bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan, perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri bukan merupakan kejahatan, karena perbuatan melacurkan diri itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana (KUHP) kita. Meskipun perbuatan itu sangat jelek bila dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat dan lain-lainnya, perbuatan itu tetap bukan merupakan perbuatan kejahatan dilihat dari definisi hukum.

Kejahatan dari sudut pandang sosiologi adalah segala perbuatan yang oleh masyarakat dianggap tercela, tanpa melihat apakah perbuatan itu dapat dihukum atau tidak dapat dihukum, atau tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perbuatan itu patut dihukum.

Dari uraian tersebut jelas bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar antara kejahatan dari sudut pandang hukum dan kejahatan dari sudut pandang sosiologis. Oleh karena itu penulis membatasi istilah dan pengertian kejahatan dari sudut pandang hukum.

b. Pengertian Kekerasan

Bila ditinjau dari segi bahasa (Estimologi), maka kekerasan berasal dari kata dasar “keras” dan mendapat awalan “ke” dan kemudian mendapat akhiran “an”. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta, 1990:425):

Kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Hanya dalam Pasal 89 KUHP (R. Soesilo, 1995:84) disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan

kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Pada penjelasan Pasal 89 KUHP (R. Soesilo, 1995:98) dijelaskan bahwa :

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

Namun perlu diketahui bahwa melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang saja. R. Soesilo (1981:126) memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut :

Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut :

1. pengrusakan terhadap barang
2. penganiayaan terhadap hewan atau orang
3. melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah
4. membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa objek kekerasan bukan hanya pada orang, tetapi juga pada benda atau hewan.

Setelah dibahas pengertian kejahatan dan pengertian kekerasan maka tibalah kita pada pertanyaan apakah yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan. Penulis menyadari bahwa belum ada suatu pengertian yang baku atau resmi termuat tentang kejahatan kekerasan. Oleh karena itu, penulis

mencoba memberikan pengertian kejahatan kekerasan dengan berdasar dari pengertian kejahatan dan kekerasan sebagaimana yang telah dibahas di atas. Kejahatan kekerasan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum dimana yang dapat memberi dampak negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasaran atau korban.

## **2. Jenis-Jenis Kejahatan Kekerasan**

Kejahatan kekerasan di dalam KUHP, pengaturannya tidak satukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP
2. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP
3. Kejahatan seperti Pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP
4. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP
5. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karna kealpaan, Pasal 359-367 KUHP

Adapun bentuk-bentuk kejahatan kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan pembunuhan
2. Kejahatan penganiayaan berat
3. Kejahatan pencurian dengan kekerasan
4. Kejahatan perkosaan
5. Kejahatan kekerasan terhadap ketertiban umum

Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan satu persatu kejahatan kekerasan tersebut diatas.

#### 1. Kejahatan Pembunuhan

Kejahatan pembunuhan sebagaimana terdapat dalam KUHP pada bab XIX yang merupakan kejahatan terhadap nyawa orang yang selanjutnya diatur dalam KUHP pada pasal 338 sampai pasal 350 adalah merupakan suatu delik materiil, maka menitik beratkan pada akibat yang diancam dengan pidanaa oleh undang-undang.

Cara dalam melakukan pembunuhan dapat berwujud bermacam-macam perbuatan, dapat berupa menikam dengan pisau, memukul dengan benda keras dan sebagainya.

#### 2. Kejahatan Penganiayaan Berat

Berbicara tentang penganiayaan berat, hal ini tidak terlepas dari Pasal 354 dan Pasal 355 KUHP, Pasal 354 KUHP (R. Soesilo, 1995:246) yang berbunyi :

- a. Barangsiapa dengan sengaja melukai atau melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun
- b. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sifersalah dihukum selama-lamanya sepuluh tahun.

Menanggapi rumusan diatas maka timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan luka berat serta apa yang menjadi indikator atau tolak ukur sehingga kejahatan itu dapat disebut sebagai penganiayaan berat? Untuk menjawab masalah

tersebut diatas, maka pasal 90 KUHP (R. Soesilo, 1995:98-99)

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah :

1. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap lagi akan sembuh lagi dengan sempurna dan dapat mendatangkan bahaya maut, jadi luka atau sakit bagaimanapun besarnya jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dengan tidak mendatangkan bahaya maut, itu bukan luka berat.
2. Terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya. Kalau hanya sementara tidak cakap melakukan pekerjaannya tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya rusak kerongkongannya sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya maka itu termasuk luka berat.
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga belum masuk pengertian ini, karna mata dan telinga lainnya masih berfungsi.
4. Kudung (rompong) cacat sehingga jelek rupanya, karena ada suatu anggota badan putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangannya atau kakinya putus dan sebagainya.
5. Lumpuh artinya tidak mampu lagi menggerakkan anggota tubuhnya.
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu, pikiran terganggu, kacau, tidak dapat berpikir lagi secara normal, semua itu lamnya empat minggu, jika kurang maka tidak termasuk pengertian luka berat.
7. Membunuh atau menggugurkan bakal anak kandungan itu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan dapat diklasifikasikan dalam penganiayaan berat menurut undang-undang apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menyebabkan atau mendatangkan luka berat. Luka berat dimaksudkan disini adalah



merupakan tujuan utama, jadi niat si pembuat harus ditujukan kepada melukai berat. Artinya luka harus dimaksudkan oleh si pembuat, apabila tidak dimaksudkan oleh si pembuat dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat (Pasal 351 Ayat 2 KUHP).

### 3. Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan

Kejahatan pencurian dengan kekerasan oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 365 KUHP (R. Soesilo, 1995:253-254) yang rumusannya sebagai berikut :

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, serta diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan(terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
2. hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
  - a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam suatu rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada di rumahnya atau di jalan umum atau di dalam suatu kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  - b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
  - c) Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
  - d) Jika perbuatan itu mengakibatkan ada orang mendapat luka berat.

3. Hukuman selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karna perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh hal dalam No. 1 dan 3.

Perlu diketahui bahwa pencurian dengan kekerasan pada dasarnya identik dengan modus pencurian lainnya, perbedaannya terletak pada klasifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan yang melekat pada perbuatan pencurian. Unsur ini merupakan unsur pokok yang penting dalam pencurian dengan kekerasan. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang dan bukan barang.

#### 4. Kejahatan Pemerkosaan

Delik pemerkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP (R. Soesilo, 1995:210) yang berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Melihat isi dari pasal tersebut, maka pemerkosaan memiliki beberapa unsur, diantaranya: laki-laki yang memaksa perempuan dengan kekerasan, perempuan itu bukan isterinya, dan paksaan itu dilakukan untuk bersetubuh. Hal lain lagi yang

harus diperhatikan bahwa persetubuhan itu harus benar-benar terjadi.

#### 5. Kejahatan Kekerasan Terhadap Ketertiban Umum

Kekerasan terhadap ketertiban umum aturannya dapat dilihat dalam pasal 170 KUHP (R.Soesilo, 1995:146), yang bunyinya adalah :

- (1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Tersalah dihukum:
  - a. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan suatu luka;
  - b. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
  - c. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Clinard dan Quenney (Ahmad Ali, 2008:67) membedakan jenis-jenis kejahatan kekerasan (*criminally violence*) sebagai berikut:

1. Pembunuhan (*murder*);
2. Pemerkosaan (*rape*);
3. Penganiayaan berat (*aggravated assault*);
4. Perampokan bersenjata (*armed robbery*);
5. Penculikan (*kidnapping*);

Oleh Clinard dan Quenney, kejahatan kekerasan di atas digolongkan ke dalam kejahatan kekerasan perorangan, sedangkan yang termasuk kejahatan kekerasan kolektif, salah satunya adalah tawuran atau yang diistilahkan oleh mereka

sebagai perkelahian antar gang remaja yang menimbulkan akibat kerusakan harta benda atau luka-luka berat atau kematian.

Teori Lemmert (Ahmad Ali, 2008:68) membedakan kejahatan kekerasan atas :

- (1) Kejahatan kekerasan primer, yaitu kejahatan kekerasan yang dilakukan untuk pertama kali;
- (2) Kejahatan kekerasan sekunder, yaitu yang menyangkut kasus seseorang mereorganisasikan cirri-ciri sosio-psikologisnya di sekitar peran penjahat. Kejahatan kekerasan sekunder sering kali merupakan pelanggaran hukum yang diulangi dan yang merupakan hasil pengalaman reaksi social

Dari segi motifnya, kejahatan kekerasan dapat dibedakan menjadi :

- a.) Kejahatan kekerasan yang bermotif keuntungan ekonomi, contohnya: pencurian dengan kekerasan (perampokan).
- b.) Kejahatan kekerasan yang bermotif menyalurkan hasrat seksual, contohnya: pemerkosaan.
- c.) Kejahatan kekerasan yang bermotif menyalurkan emosi tertentu seperti dendam dan kemarahan, contohnya: pengrusakan barang milik orang lain, penganiayaan, pembunuhan dan juga tentunya tawuran.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Kata Polisi berasal dari *politeia* (Sri Widyastuti 2005:47), yang kemudian menjadi *Policy* atau kebijaksanaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti Polisi adalah :

1. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.

2. Anggota badan pemerintah (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).

Dari arti kata polisi yang diketengahkan, kalau didalami lebih jauh, akan memberikan berbagai pengertian. Para cendekiawan dibidang kepolisian sampai pada kesimpulan bahwa dalam kata polisi itu terdapat tiga pengertian. Penggunaan sehari-hari sering tercampur aduk melahirkan berbagai konotasi. Tiga arti kata polisi adalah :

1. Polisi sebagai fungsi ;
2. Polisi sebagai organ kenegaraan dan
3. Polisi sebagai pejabat atau petugas.

Polisi dalam pengertian sehari-hari petugas atau pejabat, karena mereka yang sehari-hari berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat kepolisian meliputi anggota kepolisian dan pejabat kepolisian. Anggota kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Pejabat Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian. Menurut Soejono Soekanto (Sri Widyastuti 2005:48), Pengertian Polisi adalah "Suatu kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi kamtibmas ".

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa polisi bukan sekedar oknum berseragam polri yang dilengkapi senjata, melainkan memiliki arti yang lebih mendalam yang mengarah pada pengabdian kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) pengertian Kepolisian yaitu “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

## **2. Tugas dan Wewenang Aparat Kepolisian**

Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara pada bidang pemeliharaan kekuasaan dan ketertiban masyarakat. Mengenai tugas dan wewenang aparat kepolisian dicantumkan pada Bab III Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan pada Pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 dalam menjalankan tugas pokok kepolisian bertugas untuk:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran, kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lindungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun mengenai tata cara pelaksanaan dan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk pengamanan swakarsa lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 15, 16, dan Pasal 17 dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 memaparkan wewenang aparat kepolisian dalam menjalankan tugas.

Pada Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan dan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.



- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap bidang usaha dibidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus petugas keamanan suakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 disebutkan tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 14 dibidang proses pidana pada ayat (1) Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh orang berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan penyitaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan pemeriksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan perhentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi

dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal seseorang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntum umum, dan;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ayat (2) tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati Hak Asasi Manusia.

Pasal 17 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia No.

2 Tahun 2002 menyatakan pejabat kepolisian negara republik indonesia menjalankan tugas dan wewenangnnya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi dalam hal ini pelaksanaan tugas dan wewenang aparat kepolisian telah dipaparkan secara rinci sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan. Sebagaimana uraian tentang tata cara (teknik) penelitian yang harus dilakukan, maka Metodologi Penelitian Hukum pada pokoknya mencakup uraian mengenai:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penulisan penelitian hukum (skripsi) dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menghasut untuk Melakukan Kekerasan Terhadap Aparat Kepolisian" ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif, yang juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif khususnya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilengkapi dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan suatu penelitian

yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2010:93). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2010:94).

Dalam penelitian hukum ini, penulis berusaha menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, kemudian penulis mengambil kasus yang relevan dengan hal tersebut yakni putusan nomor 258/Pid.B/2011/PN.MKS.

### **C. Jenis dan Sumber Bahan**

Penelitian Hukum tidak mengenal adanya data, maka dari itu untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum dan bahan non-hukum, sebagaimana yang dimaksud oleh penulis sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia serta Putusan Nomor 258/Pid.B/2011/2013/PN.MKS.
2. Bahan hukum sekunder berupa kepustakaan yang terkait dengan permasalahan.

3. Bahan non-hukum berupa bahan yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian yaitu melalui wawancara terhadap hakim yang memutus perkara No. 258/Pid.B/2011/PN.MKS.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan**

Dalam rangka pengumpulan bahan hukum maupun bahan non-hukum, maka penulis menggunakan cara pengumpulan bahan sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi (bahan hukum)

Dengan cara mengumpulkan bahan, membaca dan menelaah beberapa buku dan literature yang berkaitan dengan penelitian, termasuk Putusan Hakim, Surat Dakwaan Jaksa, Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan.

2. Wawancara (bahan non-hukum)

Dengan cara mengumpulkan bahan dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus tersebut.

#### **E. Teknik Analisa Bahan**

Setelah semua bahan dikumpulkan, baik bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun bahan non-hukum diperoleh, maka bahan tersebut diolah dan dianalisa secara deskriptif

kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan yang bersifat kualitatif yakni yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk menarik kesimpulan dari bahan yang telah diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penghasutan melakukan kekerasan terhadap aparat kepolisian dalam putusan Nomor 258/Pid.B/2011/PN.MKS.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Menghasut untuk Melakukan Kekerasan terhadap Aparat Kepolisian**

Jika berbicara secara normatif, maka mahasiswa yang merupakan kaum intelek dan berpendidikan, apalagi sebagai penerus cita-cita bangsa, maka seharusnya tidak akan melakukan suatu tindak pidana atau kriminalitas. Akan tetapi karena emosi dan fanatisme dengan mengabaikan kedudukan atau posisinya, maka mereka bertindak anarkis dan melakukan pelanggaran hukum, entah disadari atau tidak, yang jelas dan pasti apa yang dilakukannya itu merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Atas dasar tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, maka mereka diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengacu pada pijakan pokok, yaitu KUHP dan KUHAP. Proses hukum yang dimaksud dimulai atau diawali dengan penyelidikan dan selanjutnya penyidikan oleh penyidik kepolisian melalui suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap terdakwa beserta para saksi yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atau dipersangkakan.

Setelah penyidik menganggap bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyidikan sudah selesai, maka penyidik akan menyerahkan berkas dan tersangkanya kepada penuntut umum untuk

selanjutnya diproses oleh pihak kejaksaan selaku penuntut umum. Atas dasar tersebut, maka pihak kejaksaan melalui penuntut umumnya (PU) melakukan penuntutan dalam suatu surat dakwaan terhadap ketiga pelaku yang masing-masing bernama Fuad Bachmid Bin Umar Bachmid, Muh.Syahban Munawir Alias Awi Bin Muh.Ramli, dan Muhammad Habibi Masdin Bin Masdin yang diduga melakukan tindak pidana penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap polisi dan penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang dan atau barang yang melanggar Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 170 KUHP.

Sebagaimana penulis gambarkan atau lukiskan secara kronologis sebagai berikut :

### **1. Posisi Kasus**

Pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Jalan Urip Sumihardjo tepatnya di dekat fly over terjadi aksi pelemparan terhadap petugas kepolisian yang sedang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa dan pengrusakan terhadap pos polisi lalu lintas serta mobil dinas polisi lalu lintas.

Awalnya aksi unjuk rasa berlangsung di depan kampus masing-masing yakni UMI, Universitas 45, UIN dan Unismuh dalam rangka memperingati hari HAM sedunia dan sebagai aksi solidaritas atas timbulnya banyak korban dari mahasiswa UMI yang menggelar aksi unjuk rasa sehari sebelumnya tepatnya pada tanggal 9 Desember 2010 dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi di Depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.



Kemudian mahasiswa UMI sekitar 30 orang berjalan ke arah fly over termasuk saksi Hasanuddin alias Aan dan terdakwa Habibie. Beberapa saat kemudian mahasiswa Universitas 45 juga datang dengan menggunakan mobil tronton termasuk terdakwa Fuad dan saksi Syamsul Asri alias Ancu. Setelah itu datang mahasiswa dari UIN dan Unismuh menggunakan sejumlah sepeda motor dan beberapa truk termasuk terdakwa Muh. Syahban alias Awi yang berada di bagian depan rombongan menggunakan motor. Setelah memarkir motornya Awi kemudian menghampiri Saksi Hasanuddin R alias Aan yang sudah ada terlebih dahulu disana dan beberapa saat kemudian Awi berteriak "Serang Polisi" kemudian dari arah mobil tronton terdakwa Fuad juga berteriak "Serang Polisi". Setelah mendengar teriakan tersebut para pengunjung rasa termasuk para terdakwa kemudian melakukan pelemparan ke arah pos polisi lalu lintas dan polisi yang sedang bertugas dengan menggunakan batu. Akibat pelemparan batu tersebut para petugas lalu lintas menyelamatkan diri dengan cara lari dan berpencar ke beberapa tempat. Beberapa anggota polisi termasuk saksi Abd. Azis lari masuk ke dalam showroom PT.Hadji Kalla namun terlihat oleh peserta unjuk rasa lainnya. Kemudian para pengunjung rasa mengejar saksi Abd.Azis dan memukulnya dengan menggunakan batu pada bagian muka sehingga mengakibatkan luka sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara. Selain itu para pengunjung rasa juga melakukan pengrusakan terhadap empat mobil PJR yang terparkir di sekitar show room PT.Hadji Kalla.

Setelah melakukan pelemparan terdakwa Habibie menghasut peserta unjuk rasa lainnya untuk melakukan pembakaran terhadap pos polisi lalu lintas dengan berteriak “Bakar-bakar” kemudian dari arah pengunjuk rasa ada yang melemparkan bom Molotov ke arah pos polisi lalu lintas sehingga pos polisi lalu lintas tersebut mengalami kebakaran pada beberapa bagian.

## 2. Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuat dakwaan dalam model dakwaan kumulatif, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2010 sekitar pukul 13.30, bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi SulSel Jalan Urip Sumihardjo No.244 atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III di muka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I melakukan unjuk rasa bersamaan dengan saksi Syamsul Asri alias Ancu di depan kampus 45 dan beberapa saat kemudian bergerak menuju fly over sedangkan Terdakwa II melakukan unjuk rasa di depan Unismuh kemudian Terdakwa II diajak oleh saksi Hasanuddin untuk bergabung dengan sejumlah peserta unjuk rasa yang berasal dari UMI termasuk Terdakwa III dan Universitas 45 yang telah ada terlebih dahulu pada tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa II kemudian menghubungi lelaki Sam Sumarlin dan beberapa mahasiswa lainnya yang merupakan korlap untuk UIN dan hasil koordinasi tersebut disepakati oleh Terdakwa II dan mereka untuk bergabung dengan peserta unjuk rasa yang telah ada di fly over;
- Bahwa Terdakwa II kemudian bergerak menuju tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor sementara peserta unjuk rasa lainnya dengan menggunakan truk;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa II kemudian menghasut peserta unjuk rasa yang lain untuk melakukan kekerasan kepada Petugas Polisi yang saat itu sedang bertugas untuk melakukan pengaturan lalu lintas dengan berteriak “**serang polisi**” dan Terdakwa I yang saat itu tengah berada di

atas kap mobil tronton kemudian melompat turun dari mobil tersebut selanjutnya berteriak **“serang polisi, serbu polisi”** untuk menghasut peserta unjuk rasa supaya melakukan penyerangan terhadap polisi yang sedang bertugas mengatur jalannya lalu lintas;

- Bahwa teriakan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian diikuti oleh peserta unjuk rasa yang lainnya dengan cara melakukan pelemparan kepada Polisi Lalu Lintas yang sedang bertugas untuk mengatur jalannya lalu lintas;
- Bahwa akibat pelemparan batu dari para pengunjung rasa, petugas Polisi Lalu Lintas kemudian menyelamatkan diri dengan cara berlari dan berpecah ke beberapa tempat;
- Bahwa salah seorang anggota Polisi yaitu Saksi Kopol. Abd. Azis lari masuk ke dalam show room PT. Hadji Kalla akan tetapi terlihat oleh peserta unjuk rasa lainnya yang mengejar Saksi Kopol. Abd. Azis dan memukulnya dengan menggunakan batu pada bagian muka sehingga mengakibatkan luka sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa diwaktu yang hampir bersamaan peserta unjuk rasa yang lain kemudian melakukan pelemparan terhadap Pos Polisi Lalu Lintas yang berada tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa III menghasut peserta unjuk rasa yang lain untuk melakukan pembakaran terhadap Pos Polisi Lalu Lintas dengan meneriakan kata **“Bakar, bakar”**;
- Bahwa teriakan Terdakwa III kemudian diikuti oleh pengunjung rasa sehingga Pos Polisi Lalu Lintas tersebut mengalami kebakaran pada beberapa bagian tempat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 160 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----  
-----DAN-----

#### KE DUA :

Pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2010 sekitar pukul 13.30, bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi SulSel Jalan Urip Sumihardjo No.244 atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, yang para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I melakukan unjuk rasa bersamaan dengan saksi Syamsul Asri alias Ancu di depan kampus 45 dan beberapa saat kemudian bergerak menuju fly over sedangkan Terdakwa II melakukan unjuk rasa di depan Unismuh kemudian Terdakwa II diajak oleh saksi Hasanuddin untuk bergabung dengan sejumlah peserta unjuk rasa yang berasal dari UMI

termasuk Terdakwa III dan Universitas 45 yang telah ada terlebih dahulu pada tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa II kemudian menghubungi lelaki Sam Sumarlin dan beberapa mahasiswa lainnya yang merupakan korlap untuk UIN dan hasil koordinasi tersebut disepakati oleh Terdakwa II dan mereka untuk bergabung dengan peserta unjuk rasa yang telah ada di fly over;
- Bahwa Terdakwa II kemudian bergerak menuju tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor sementara peserta unjuk rasa lainnya dengan menggunakan truk;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa II kemudian berteriak diantara peserta unjuk rasa yang lain "Serang Polisi" dan Terdakwa I yang pada saat itu tengah di atas kap mobil tronton kemudian melompat turun dari mobil tersebut selanjutnya berteriak "Serang Polisi";
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan peserta unjuk rasa lainnya kemudian melakukan pelemparan kepada Polisi Lalu Lintas yang sedang bertugas untuk mengatur jalannya lalu lintas dengan menggunakan batu berkali-kali;
- Bahwa akibat lemparan batu dari para pengunjuk rasa petugas Polisi Lalu Lintas kemudian menyelamatkan diri dengan cara berlari dan berpecah ke beberapa tempat;
- Bahwa Saksi Kopol.Abd. Azis yang saat itu sedang bertugas pada tempat tersebut lari menyelamatkan diri ke dalam showroom mobil PT. Hadji Kalla akan tetapi terlihat oleh peserta unjuk rasa yang lainnya dan selanjutnya mengejar Saksi Kopol.Abd. Azis dan memukulnya dengan menggunakan batu pada bagian muka sehingga mengakibatkan luka sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara dan tidak hanya sampai disitu, para mahasiswa kemudian melakukan pengrusakan terhadap mobil PJR yang sedang terparkir di dalam show room tersebut;
- Bahwa diwaktu yang hampir bersamaan para terdakwa bersama dengan pengunjuk rasa yang lain kemudian kembali melakukan kekerasan terhadap Pos Polisi Lalu Lintas dengan cara melakukan pelemparan kepada Pos tersebut dengan menggunakan batu hingga beberapa kali;
- Bahwa akibat pelemparan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan pengunjuk rasa yang lain Pos Polisi Lalu Lintas tersebut mengalami rusak parah pada bagian kaca dan bagian dalam Pos tersebut terbakar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP-----

### 3. Tuntutan

Berdasarkan dakwaan penuntut umum sebelumnya, maka Penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Makassar yang berkompeten dalam perkara tindak pidana ini menuntut para terdakwa sebagai berikut :

#### M E N U N T U T

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan Terdakwa I Fuad Bachmid, Terdakwa II Muh. Syahban Munawir Alias Awi dan Terdakwa III Muhammad Habibi Bin Masdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap Polisi dan penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang dan atau barang”** sebagaimana Surat Dakwaan kami;

Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah untuk tetap di tahan;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) buah batu;
- 2 (dua) batang bambu;
- Satu bata kayu;
- Pecahan bom Molotov;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- Pecahan kaca naco jendela Pos Polisi Lalulintas;
- 1 (satu) unti rotator mobil Patroli Lalulintas dalam keadaan rusak;
- Satu lembar potongan daun pintu Pos Polisi Lalulintas;
- Pecahan kaca belakang mobil Patroli Lalulintas;

Dikembalikan kepada yang berhak.

Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

### 4. Amar Putusan

Atas dasar dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Makassar, maka Pengadilan Negeri Makassar yang berkompeten menyidangkan dan memeriksa perkara tindak pidana sebagaimana telah dikemukakan di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku (KUHP) dan telah menjatuhkan *vonnis* atau putusan sebagai berikut:

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **FUAD BACHMID BIN UMAR BACHMID, MUH. SYAHBAN MUNAWIR** Alias **AWI BIN MUH. RAMLI, MUHAMMAD HABIBI MASDIN BIN MASDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap polisi dan penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang dan atau barang” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut masing-masing di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----  
-----
3. Menetapkan, bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----  
----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;-----  
----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 30 (tiga puluh) batu
  - 2 (dua) batang bambu
  - 1 (satu) batang kayu
  - Pecahan bom MolotovDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit rotator mobil patrol
  - 1 (satu) lembar potongan daun pintu pos polisi lalulintas
  - Pecahan kaca nako jendela pos polisi lalulintas
  - Pecahan kaca belakang mobil patrol lalulintasDikembalikan kepada yang berhak
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;-----  
----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Haki Pengadilan Negeri Makassar pada hari : **Senin, Tanggal 18 April 2011** oleh : **WAYAN KARYA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **TARDI, S.H.** dan **MAS;UD, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **SAENAL AKBAR, S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ADNAN H, S.H.** Penuntut Umum dan terdakwa ;

## 5. Analisis Penulis

Menurut Satochid Kartanegara (Bambang Waluyo, 6:2008), hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang:

1. Perbuatan dapat diancam dengan hukuman (*strafbar feit*);
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana;
3. Hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau juga disebut hukum *penetentiair*.

Termasuk kedalam hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut.

Dalam setiap dakwaan pasti secara formil dibuat surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan suatu akta yang memuat tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar hukum bagi Hakim dalam pemeriksaan di persidangan.

Menurut penulis, terdapat kekeliruan dalam penyusunan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dalam memenuhi syarat materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) ke-2 KUHAPidana, yaitu harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dalam surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa penuntut umum tanggal terjadinya tindak pidana tidak bersesuaian dengan keterangan

saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang disusun oleh penyidik yang menyatakan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Urip Sumihardjo dekat fly over dan seperti yang kita ketahui bahwa Hari HAM sedunia jatuh pada tanggal 10 Desember. Sedangkan dalam surat dakwaan tertulis hari Selasa tanggal 02 Nopember sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Kejaksaan Tinggi SulSel Jalan Urip Sumihardjo No. 244. Hal ini membuktikan bahwa Jaksa penuntut umum tidak teliti dalam menyusun surat dakwaan tersebut.

Penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus bersifat cermat terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

Pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dalam bentuk dakwaan kumulatif yaitu Kesatu: melanggar Pasal 160 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua: melanggar Pasal 170 KUHP maka semua dakwaan harus dibuktikan satu persatu.

Untuk membuktikan semua dakwaan maka unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- **Dakwaan kesatu: Pasal 160 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

- 1. Unsur barangsiapa**

- Yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana



padanya yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Fuad Bachmid, Muh. Syahban Munawir dan Habibi Bin Masdin yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta alat bukti lainnya, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai manusia yang dapat memper-tanggungjawabkan perbuatannya.

## **2. Dengan lisan atau tulisan**

Yang dimaksud dengan lisan atau tulisan adalah tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara langsung dengan lisan atau ucapan yang mengandung kata-kata menghasut atau melalui tulisan berupa karangan yang sifatnya menghasut. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa Muh. Syahban Munawir alias Awi berteriak “serang polisi” dan diwaktu yang hampir bersamaan terdakwa Fuad yang berada di atas truck tronton juga berteriak “serang polisi.” Mendengar hal tersebut peserta unjuk rasa kemudian melakukan pelemparan kepada Polisi dan Pos Polisi Lalu Lintas serta merusak empat mobil dinas polisi. Kemudian terdakwa Habibi selanjutnya diantara peserta unjuk rasa yang melakukan pelemparan kepada Pos Polisi Lalu Lintas berteriak “Bakar-bakar” dan tidak berselang lama dari teriakan terdakwa Habibi terjadi pembakaran Pos Polisi Lalu Lintas.

Karena sub unsur ini adalah bersifat alternatif apakah secara lisan atau tulisan sehingga berdasarkan uraian pembuktian tersebut di

atas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

### **3. Di muka umum**

Unsur di muka umum mengandung pengertian “hasutan” itu dilakukan di tempat umum, tempat yang didatangi oleh orang banyak atau dapat didengar oleh orang banyak. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa Fuad Bachmid, Muh. Syahban Munawir alias Awi berteriak “serang polisi” dan terdakwa Habibi Bin Masdin berteriak “Bakar-bakar” di tengah-tengah kerumunan peserta unjuk rasa dengan teriakan lantang yang mana teriakan para terdakwa tersebut dapat terdengar baik oleh peserta unjuk rasa maupun petugas polisi yang berada di Jalan Urip Sumihardjo tepatnya dekat fly over yang merupakan suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak atau umum.

### **4. Menghasut orang untuk melakukan suatu tindak pidana, atau supaya orang tidak menaati suatu peraturan perundang-undangan atau suatu perintah jabatan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan**

Pengertian penghasutan berasal dari kata “hasut menghasut”, menghasut adalah membuat orang berminat, bernafsu, atau turut mendendam supaya orang lain melakukan perbuatan seperti yang dihasut itu, esensi dari perbuatan menghasut adalah usaha seseorang

untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang biasanya dikehendaki oleh penghasut.

Termasuk menghasut apabila orang lain tersebut atau terhasut telah memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang dihasutkan oleh penghasut. Adanya hasutan dari penghasut sebagai pemicu orang tersebut kemudian melaksanakan niatnya untuk melakukan perbuatan pidana. Tujuan perbuatan menghasut bersifat limitatif, yakni penghasutan ditujukan supaya orang melakukan tindak pidana. Jadi orang yang awalnya tidak punya niat kemudian berniat melakukan tindak pidana setelah terhasut, supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau supaya tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, atau supaya tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan terdakwa dibawah sumpah di depan persidangan bahwa terdakwa Awi berteriak “serang polisi” dan diwaktu yang hampir bersamaan terdakwa Fuad yang berada di atas mobil tronton jug berteriak “serang polisi.” Mendengar teriakan tersebut menggerakkan peserta unjuk rasa untuk melakukan pelemparan kepada Polisi dan Pos Polisi Lalu Lintas.

Terdakwa Habibie selanjutnya di antara peserta unjuk rasa yang melakukan pelemparan kepada Pos Polisi Lalu Lintas berteriak “Bakar-bakar” dan tidak berselang lama kemudian terjadi pembakaran

terhadap Pos Polisi Lalu Lintas. Bahwa kata bakar dalam hal ini dianggap suatu tindak pidana karena merusak Pos Polisi Lalu Lintas.

**5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.**

Yang dimaksud dengan orang yang melakukan atau pelaku adalah tiap orang yang melakukan seluruh delik. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yakni terdakwa Fuad Bachmid, Muh. Syahban Munawir alias Awi berteriak “serang polisi” dan terdakwa Habibi Bin Masdin berteriak “bakar-bakar” di tengah-tengah kerumunan peserta unjuk rasa dengan teriakan lantang dan bersama-sama melakukan pelemparan terhadap Polisi dan Pos Polisi Lalu Lintas.

- **Dakwaan kedua: Pasal 170 KUHP**

**1. Unsur barangsiapa**

Yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana padanya yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Fuad Bachmid, Muh. Syahban Munawir dan Habibi Bin Masdin yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta alat bukti lainnya, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai manusia yang dapat memper-tanggungjawabkan perbuatannya.

## **2. Melakukan kekerasan**

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan suatu tenaga atau kekuatan yang lebih besar dari biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan. Akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup apabila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa terdakwa melakukan kekerasan dengan cara melempari Polisi dan Pos Polisi Lalu Lintas dengan menggunakan batu berkali-kali. Selain itu juga merusak empat mobil dinas polisi yang terparkir di depan show room PT. H. Kalla.

## **3. Dengan terang-terangan**

Yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tempat dimana perbuatan yang dilakukan dapat dilihat oleh orang banyak atau umum. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa melakukan pelemparan terhadap Pos Polisi Lalu Lintas dan aparat kepolisian yang berada di jalan Urip Sumiharjdo tepatnya dekat fly over yang merupakan suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak atau umum.

## **4. Dengan tenaga bersama**

Yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau dilakukan oleh dua orang atau lebih. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan terdakwa

diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa melakukan kekerasan dengan cara terdakwa Muh. Syahban Munawir alias Awi berteriak “serang polisi” dan diwaktu yang hampir bersamaan terdakwa Fuad Bachmid yang berada di atas mobil tronton juga berteriak “serang polisi.” Mendengar teriakan tersebut peserta unjuk rasa bersama dengan para terdakwa kemudian melempari Polisi dan Pos Polisi Lalu Lintas dengan menggunakan batu serta merusak empat mobil dinas polisi.

#### **5. Ditujukan terhadap orang atau barang**

Yang dimaksud dengan ditujukan terhadap orang atau barang adalah bahwa kekerasan yang dilakukan tersebut sasarannya adalah orang atau barang. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap aparat kepolisian, pos polisi lalu lintas dan empat mobil dinas polisi.

Berdasarkan uraian pembuktian di atas, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pada Pasal 160 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 170 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana materiil pada perkara ini telah sesuai dan tepat.

## **B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana dalam Putusan No.258/Pid.B/2011/PN.MKS**

### **1. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada tindak pidana menghasut untuk melakukan kekerasan terhadap aparat kepolisian dalam Putusan No.258/Pid.B/2011/PN.Mks, berdasarkan beberapa pertimbangan. Hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca surat dakwaan tersebut, maka hakim belum bisa menjatuhkan putusan karena hakim belum memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tanpa berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis. Adapun alat bukti yang didapatkan yaitu :

- Keterangan saksi-saksi yaitu Abd. Azis, Bakri S, Guritno, M.Jafar, Supirman, Israil B, Apriandi Makkasau A.Kanna, Hasanuddin R alias Aan, dan Syamsul Asri alias Ancu.
- Alat bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* dari RS. Bhayangkara Mappaodang Makassar No.Pol: VER/07/XII/2010/RUMKIT tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dr. Bogie.
- Barang bukti :
  - 30 (tiga puluh) batu
  - 2 (dua) batang bambu
  - 1 (satu) batang kayu
  - Pecahan bom Molotov
  - 1 (satu) unit rotator mobil patrol
  - 1 (satu) lembar potongan daun pintu pos polisi lalulintas
  - Pecahan kaca nako jendela pos polisi lalulintas
  - Pecahan kaca belakang mobil patrol lalulintas

- Keterangan terdakwa yaitu Fuad Bachmid, Muh.Syahban Munawir alias Awi, dan Habibi Bin Masdin.
- Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sehingga terdapat petunjuk yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, yang juga merupakan bukti yang cukup tentang perbuatan terdakwa.

Pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan pemidanaan suatu tindak pidana sangat bergantung pada hakim yang merumuskan dasar pertimbangan. Adapun dasar pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan No. 258/Pid.B/2011/PN.Mks adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan tertanggal No. PDM-230/MKS/EP/02/2011 yaitu melanggar Pasal 160 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 7 (tujuh) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni : **1. BAKRI,S ; 2. GURITNO ; 3. APRAINDI MAKKASAU ANDI KANNA ; 4. M.FAJAR ; 5. SUDIRMAN ; 6. BAKRI ; 7. ABDUL AZIS;** sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan;
- Menimbang, bahwa para Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara ;
- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah saling bersesuaian dan didukung pula dengan barang bukti yang ada sehingga melahirkan kesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana **penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap**



**polisi dan penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang dan atau barang;**

- Menimbang, bahwa dakwaan telah terbukti ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana ddakwakan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sert Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini ;
- Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat ;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada di dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Para terdakwa tidak mengakui dan tidak berterus terang atas perbuatannya ;
- Perbuatan para terdakwa bersama dengan sejumlah peserta unjuk rasa yang lain telah mengakibatkan kerusakan kepada pos Polisi Lalulintas ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan sopan di depan persidangan ;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa masih muda sehingga harapan dan kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri terbuka lebar;
- Para Terdakwa menyesal atas aksi anarkis yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan sejumlah peserta unjuk rasa yang lain;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka para terdakwa harus

- membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;
- Memperhatikan Pasal 160 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 170 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## **2. Analisis Penulis**

Keputusan hakim sangat bergantung dari proses pembuktian dan keyakinan hakim dengan berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan yang diberikan dalam bentuk putusan yang sifatnya memaksa. Sebagaimana asas hukum dimana hakim berperan aktif dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Pembuatan suatu putusan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan tidak gampang sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, barang-barang bukti, keterangan terdakwa, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, dan pertimbangan nonyuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berkaitan dengan kasus yang penulis bahas, oleh karena hakim yang menangani kasus ini telah dimutasikan ke tempat lain, maka Ketua Pengadilan Negeri Makassar kemudian menunjuk hakim pengganti untuk kemudian penulis lakukan wawancara padanya.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Hakim (Mahyuti, wawancara tanggal 03 Desember 2013) yang memberikan gambaran secara umum terhadap kasus yang penulis angkat yang menyatakan bahwa :

Hakim yang menangani kasus ini tentu telah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang ada baik itu pada **pertimbangan yuridis maupun dengan menilai apa yang ada dalam ruang persidangan yang dalam hal ini adalah mengenai keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dakwaan dan tuntutan jaksa (sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dengan Pasal yang dituntutkan pada terdakwa), keyakinan hakim dan sebagainya.** Semua itu merupakan hal yang harus diperhatikan dan membutuhkan kejelian dalam menggali kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang dianggap adil.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pada amar putusan, Hakim memutuskan bahwa terdakwa Fuad Bachmid, Muh.Syahban Munawir alias Awi, dan Muhammad Habibi Bin Masdin bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap polisi dan penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang dan atau barang. Dengan terbuktinya melakukan tindak pidana tersebut maka menurut pandangan penulis unsur-unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi disertai dengan pertimbangan dari hakim baik berdasarkan pertimbangan yuridis, fakta persidangan maupun pada alat bukti yang mendukung dalam persidangan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yaitu:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Namun penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih sangat ringan serta masih jauh dari ancaman maksimal pidananya yaitu 6 tahun penjara. Sedangkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim hanya 4 (empat) bulan penjara, dimana hal ini penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa tidak akan menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi terpidana maupun oleh orang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama.

Pemberian efek jera (*deterrent effect*) dan daya cegah (*preveny effect*) disini dengan maksud bahwa melalui pemberian sanksi pidana yang tajam diharapkan dapat memberikan efek *prevensi general* yaitu masyarakat akan berusaha mentaati hukum karena takut akan sanksi pidananya, disamping adanya efek jera bagi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi (*prevensi special*).

Meskipun penulis menyadari, bahwa instrument pidana meskipun dengan sanksi yang tegas bukanlah satu-satunya upaya yang dapat menanggulangi dan memberantas tindak pidana menghasut untuk melakukan kekerasan terhadap aparat kepolisian tetapi diharapkan dengan tindakan yang konsekuen dan konsisten secara ber-kesinambungan dapat membuat orang berpikir berkali-kali jika ingin melakukannya, mengingat tindak pidana menghasut merupakan tindak pidana yang paling sering terjadi jika aksi unjuk rasa yang sifatnya merugikan dan mengganggu ketertiban umum.

Namun hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa baik itu berdasarkan dari

tuntutan jaksa penuntut umum atau bahkan lebih dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan hakim (Mahyuti, wawancara tanggal 03 Desember 2013) menurutnya bahwa :

Setiap hakim tentu mempunyai pertimbangan masing-masing dalam menjatuhkan putusan, termasuk tingginya peringanan hukuman bagi terdakwa. Hakim dalam kasus ini tentu melihat bahwa terdakwa masih muda dan masih punya waktu yang panjang untuk memperbaiki diri dalam hal ini melanjutkan kuliahnya. Sehingga hakim memutus perkara dengan hukuman yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum.

Tetapi walaupun demikian hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar mempertimbangkan segala aspek termasuk bahwa pembedaan itu mempunyai delik psikologi (efek jera bagi para pelakunya).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penulis dalam bab pembahasan dan hasil penelitian, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap tindak pidana menghasut untuk melakukan kekerasan terhadap aparat kepolisian dalam putusan No.258/Pid.B/2011/PN.Mks yakni Pertama Pasal 160 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 170 KUHP telah sesuai dan tepat. Hal ini terlihat atas terpenuhinya semua unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Namun yang perlu dicermati adalah mengenai surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum yang mengalami kekeliruan pada tanggal dan tempat terjadinya tindak pidana. Hal ini karena Jaksa penuntut umum kurang teliti dalam menyusun surat dakwaan.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan nomor 258/Pid.B/2011/PN.Mks telah sesuai dengan berdasarkan pada analisis yuridis, fakta-fakta persidangan, alat bukti baik berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, petunjuk serta diperkuat dengan keyakinan hakim sendiri. Namun hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih cukup ringan serta masih jauh dari ancaman maksimal pidananya yaitu 6 (enam) tahun penjara, dimana dalam hal ini penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa

tidak akan menimbulkan efek jera pada terdakwa itu sendiri dan tidak akan menimbulkan rasa takut oleh orang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama.

## **B. Saran**

Sebagai pelengkap dalam penulisan hukum (skripsi) ini maka penulis akan menyumbangkan beberapa pemikiran-pemikiran yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk saran yaitu :

1. Penulis mengharapkan kepada segenap penegak hukum agar setiap pelaku kejahatan (khususnya tindak pidana menghasut) sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang mampu membuat para pelaku kejahatan jera. Namun terkhusus kepada Jaksa Penuntut Umum benar-benar memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kecermatan Jaksa Penuntut Umum dalam memformulasikan bentuk surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan seperti dalam surat dakwaan dalam perkara yang penulis bahas.
2. Demokrasi adalah bagian dari reformasi dan cita-cita bersama. Oleh karena itu, mari kita ciptakan demokrasi yang bermartabat, tertib, dan demokrasi yang mendorong kebersamaan dan persatuan sehingga dapat menyelamatkan demokrasi itu sendiri, budaya, nilai, serta peradaban bangsa. Selain itu, politik premanisme sepantasnya tidak lagi dipertontonkan di era keterbukaan, agar rakyat dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik serta lancar dan bagi para mahasiswa agar dalam menyampaikan aspirasinya dilakukan dengan cara demokrasi elegan dan intelektual, berupa mengandalkan

kekuatan wacana, diskusi, serta orasi. Selain itu bagi penguasa agar membiasakan telinga mendengar kritik sepanjang gerakan mahasiswa murni meneriakkan aspirasi politik demi perubahan bangsa dan Negara kearah yang lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. 2008. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: PT.Yarsif Watampone.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia.
- Harahap, Krisna. 1996. *Rambu-Rambu di Sekitar Provesi Wartawan*. Bandung: Grafiti Budi Utami.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Cetakan keenam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Cetakan keenam. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 1984. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jogjakarta: Liberty.
- Soesilo, R. 1981. *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana (Sistim Tanya-Jawab)*. Bogor: Politeia.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Solahuddin. 2008. *KUHP, KUHPA, & KUHPdt*. Jakarta: Visimedia.
- Sri, widyastuti. 2005. *Tindak Pidana Kelalaian Penggunaan Senjata Api yang Menyebabkan Kematian Oleh Aparat Kepolisian*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sudarto. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugandhi, R. 1980. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wirjono, Prodjodikoro. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

\_\_\_\_\_. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama.

W. J. S. Poerwadarminta. 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan Nasional. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.